

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 08 /PB/2009

TENTANG
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diperlukan Bagan Akun Standar yang lengkap dan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (pelaporan) seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dinyatakan bahwa Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal 1

- (1) Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar ini digunakan sebagai pedoman oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Ruang Lingkup penambahan dan perubahan Bagan Akun Standar ini meliputi penambahan kode akun/mata anggaran, perubahan kode akun/mata anggaran dan penjelasan, dan kode akun yang tidak digunakan lagi.

M

Pasal 2

Penambahan dan perubahan kode akun/mata anggaran dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini terdiri dari:

- a. penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. penambahan dan/atau perubahan penjelasan kode akun/mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- d. perubahan Kodifikasi maupun Uraian kode akun/mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. perubahan Kodifikasi maupun Uraian Akun Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. kode akun/mata anggaran yang tidak digunakan lagi sejak tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

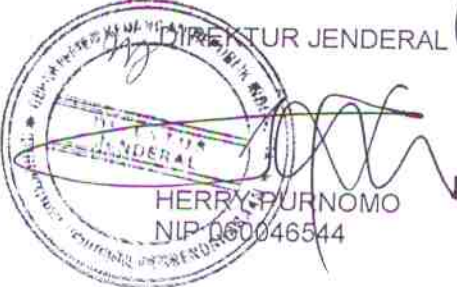
Pasal 3

Bagan Akun Standar yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2009


DIREKTUR JENDERAL
HERRY PURNOMO
NIP. 060046544

**PENAMBAHAN KODE AKUN PADA PMK.91/PMK.05/2007
 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR YANG BERLAKU SEJAK TAHUN 2008**

KODE	URAIAN AKUN
AKUN NERACA	
AKUN ASET	
1113	Rekening Pemerintah Lainnya
11132	Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111325	Rekening Pemerintah di Bank Umum dalam Rangka Penempatan
1131	Piutang Pajak
11318	Piutang Cukai lainnya
113186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
113187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
1136	Uang muka belanja
11363	Belanja Dibayar dimuka
113631	Belanja pegawai yang dibayar dimuka
113632	Belanja barang yang dibayar dimuka
113633	Belanja pembayaran bunga yang dibayar dimuka
1332	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1333	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1334	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1531	Aset Tak Berwujud
15315	Software
153151	Software
15316	Lisensi
153161	Lisensi
15317	Hasil Kajian/Penelitian
153171	Hasil Kajian/Penelitian
AKUN KEWAJIBAN	
2113	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
21131	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
211317	Utang Kelebihan Bayar Bea keluar
2212	Utang Jangka Panjang
22124	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN
221241	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN

KODE	URAIAN AKUN
AKUN PENDAPATAN	
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411613	Pendapatan Pajak Penjualan (PPn) Batubara
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau)
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Transaksi Non Kas)
4122	Pendapatan Bea Keluar
41221	Pendapatan Bea Keluar
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
4214	Pendapatan Kehutanan
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar kegiatan Kehutanan
4232	Pendapatan Jasa
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account)
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
423254	Pendapatan dari Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
4237	Pendapatan Iuran dan Denda
42375	Pendapatan Denda
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA

KODE	URAIAN AKUN
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
AKUN BELANJA	
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/Polri
511245	Belanja Tunjangan Cacat dan Santunan TNI/Polri
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511338	Belanja Tunjangan Fasilitas KPK Pejabat Negara
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
5135	Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI
51351	Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran Eks PNS Dephub pada PT KAI
513511	Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran Eks PNS Dephub pada PT KAI
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan – Non BBM
55134	Belanja Subsidi Minyak Goreng
551341	Belanja Subsidi Minyak Goreng
552	Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
5811	Belanja Lain-Lain
58114	Belanja Lain-Lain III
581143	Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah karena Pengeluaran Ineligible
581144	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM

KODE	URAIAN AKUN
581145	Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah
AKUN TRANSFER KE DAERAH	
6221	Transfer Dana Penyesuaian
62211	Transfer Dana Penyesuaian
622113	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi Penghasil
622114	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil
622115	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Lainnya
622116	Transfer Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana
AKUN PEMBIAYAAN	
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)
7224	Pengembalian Pinjaman
72241	Pengembalian Pinjaman Ineligible
722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible
7241	Penyertaan Modal Negara
72411	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724112	Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN
AKUN NON ANGGARAN	
8111	Penerimaan PFK 10% Gaji
81112	Penerimaan Setoran PFK Eks PNS PT KAI
811121	Penerimaan Setoran PT KAI-luran Pegawai PT KAI
811122	Penerimaan Setoran PT KAI-luran Pegawai PSL
811123	Penerimaan Setoran PT KAI-Kontribusi PT KAI
8145	Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan
81451	Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan dari Rekening 502.000000

KODE	URAIAN AKUN
814511	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
814512	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan ke Rekening 502.000000
8211	Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji
82112	Penerimaan Setoran PFK Eks PNS PT KAI
821121	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Iuran Pegawai PT KAI
821122	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Iuran Pegawai PSL
821123	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Kontribusi PT KAI
8245	Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan
82451	Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan dari Rekening 502.000000
824511	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
824512	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan ke Rekening 502.000000
8251	Pengeluaran Transito
82511	Pengeluaran Transito
825114	Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP Tahun Anggaran Yang Lalu

**PENAMBAHAN KODE AKUN PADA PMK.91/PMK.05/2007
 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR YANG BERLAKU SEJAK TAHUN 2009**

KODE	URAIAN AKUN
AKUN PENDAPATAN	
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411316	Pendapatan PBB Migas
4237	Pendapatan Iuran dan Denda
42375	Pendapatan Denda I
423759	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan penerimaan Negara oleh Bank/Pos persepsi
42376	Pendapatan Denda II
423761	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan Saldo BO II ke BO I
423762	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pembagian PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian
423261	Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
423265	Pendapatan tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
423266	Pendapatan Klinik Pengemudi (KLIPENG)
423267	Pendapatan Senjata Api (SENPI)
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Berupa Barang (Transaksi Non Kas)
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Berupa Jasa (Transaksi Non Kas)
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri Non Kas
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Barang (Transaksi Non Kas)
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Jasa (Transaksi Non Kas)
AKUN BELANJA	
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51314	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP
513141	Belanja Tunjangan/Dana Kehormatan Veteran RI

